

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN DI KELURAHAN SANANWETAN**
*(The Community Knowledge on Social Security Administering Agency
(BPJS) of health in Sananwetan village)*

Sunarti, Anita Putri Agustina
Poltekkes Kemenkes Malang
email:S.Kepsunarti@yahoo.co.id

Abstract: *Social Security Administering Agency (BPJS) of health is legal entity that are created to hold the health insurance. The participants of health insurance usually do not care about their health because they do not understand about the BPJS management. In consequence, it created problem and complain and insatisfaction. The purpose of the research was to know the knowledge of people about Social Security Administering Agency (BPJS) of health in Blitar city. The design was descriptive. the sample was 100 head of the families using quota sampling technique. Data collection was done on 30 Mei-30 Juni 2016. The result showed 73% had good knowledge, 27% had fair knowledge. This was due to almost all of families participate in BPJS of health could access the information easily, but not experienced in gaining benefit their participation. A direct or indirect guidance of BPJS management to people were needed to be increased so that people could get their right and follow the procedure.*

Keywords: *knowledge, Social Security Administering Agency (BPJS) of health*

Abstrak: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Peserta asuransi kesehatan kurang peduli dengan kesehatannya karena kurang memahami tentang penyelenggaraan BPJS Kesehatan, sehingga terjadi permasalahan dan timbul keluhan yang menjadi sumber ketidakpuasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan Masyarakat Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 Kepala Keluarga. Teknik sampel menggunakan teknik sampling kuota. Pengumpulan data dilakukan tanggal 30 Mei-30 Juni 2016. Hasil penelitian menunjukkan 73% Kepala Keluarga memiliki pengetahuan baik, 27% Kepala Keluarga memiliki pengetahuan cukup. Hal ini dipengaruhi karena hampir seluruh Kepala Keluarga menjadi peserta BPJS Kesehatan dan dengan mudah dapat mengakses informasi, namun belum berpengalaman dalam memanfaatkan kepesertaannya. Sosialisasi tentang penyelenggaraan BPJS Kesehatan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan haknya dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: pengetahuan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI: 2013).

Terlaksananya program pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah berlangsung hampir 2 tahun. Jaminan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

menjadi prioritas pertama dalam pelaksanaan yang dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Jaminan kesehatan ini berasal dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan sosial untuk memberikan kesejahteraan. Melalui program BPJS Kesehatan ini, masyarakat bisa mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada November 2011 menjadi satu bekal menuju sistem jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Undang-undang tersebut mengamanatkan transformasi empat badan penyelenggara yaitu PT Askes (persero) menjadi BPJS Kesehatan pada Januari 2014, PT Jamsostek (persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2012. Dua BPJS ini memiliki manfaat yang berbeda. BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. BPJS adalah badan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPJS berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara dengan kemungkinan untuk mendirikan kantor perwakilan di Propinsi dan Kabupaten/kota (Shihab, 2012:182).

Berdasarkan amanat pada perubahan UUD 1945 pasal 34 ayat 2, bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJNS) pada tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2011 serta rencana pencapaian Universal Coverage Insurance (UCI) pada tahun 2019 yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2014 meniscayakan adanya langkah dan upaya yang mencapai target tersebut (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2012:75).

Data yang didapatkan dari BPJS kesehatan (2015) jumlah peserta BPJS Kesehatan di Indonesia saat ini 153.080.124 jiwa. Menurut Suarasurabaya (2015) jumlah peserta BPJS Kesehatan di Jawa Timur 17.974.697 jiwa. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Blitar dari tiga kecamatan didapatkan jumlah peserta jamkesmas 25.227 jiwa, dan peserta jamkesda 10.445 jiwa. Dari tiga kecamatan tersebut jumlah pemegang kartu terbanyak adalah di wilayah Kecamatan Sukorejo dan pemegang kartu paling sedikit adalah di wilayah Kecamatan Kepanjan Kidul.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dari 6 orang didapatkan 4 orang belum mengetahui tentang pelaksanaan BPJS Kesehatan, apa pengertian BPJS Kesehatan dan manfaat menjadi peserta BPJS. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi mengenai BPJS Kesehatan. Dan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih bingung dengan pengertian BPJS Kesehatan. Jika ditanya, apakah mereka sudah ikut BPJS kesehatan. Sebagian besar menjawab sudah, dan juga sebagian menjawab belum. Pertanyaan selanjutnya untuk yang belum ikut adalah mengapa mereka tidak ikut BPJS. Jawabannya sering dikaitkan dengan tidak adanya informasi yang jelas tentang apa itu BPJS Kesehatan. Kadang mereka yang ikut BPJS Kesehatan karena ikut dengan teman, tetangga atau saudara yang punya BPJS kesehatan. Namun sayangnya mereka belum jelas pengertian jaminan kesehatan itu apa dan apa manfaatnya (http://www.kompasiana.com/www.inatanaya.com/setahun-bersama-bpjs-kesehatan-perluas-sosialisasi-bpjs-kesehatan_55c71cee117b611c090a7343, diakses 24 Oktober 2015).

Selain itu menurut harian *Republika* (2015) dari sisi pelayanan, masih banyak permasalahan yang dialami peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit (RS), baik RS pemerintah maupun RS swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pasien kerap kali disuruh membeli obat sendiri, membayar biaya perawatan karena total biaya sudah melebihi paket INA CBGs, bahkan terjadi penolakan RS dengan alasan kamar penuh (<http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/06/24/nqfssa4-bpjs-watch-pelaksanaan-jkn-banyak-masalah>, diakses 24 Oktober 2015).

Program pemerintah ini berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoatmojo, 2003:121).

Berdasarkan uraian tersebut yang menjelaskan bahwa pengetahuan yang ada di masyarakat tentang program pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini, masyarakat masih belum tahu sepenuhnya. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk

meneliti pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah semua Kepala Keluarga yang ada di kelurahan Sananwetan, besar sampel sebanyak 100 orang dengan teknik kuota sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan secara *door to door*. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 Mei–30 Juni 2016. Analisa data secara deskriptif dengan tampilan prosentase.

HASIL PENELITIAN

Secara umum, pengetahuan masyarakat tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di Kelurahan Sananwetan seperti dalam tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Karakteristik masyarakat tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan di Kelurahan Sananwetan, bulan Juni 2016 (n=100)

No	Karakteristik	f	%
1	Usia :		
	26-35 tahun	14	14
	36-45 tahun	24	24
	46-55 tahun	49	49
2	56-65 tahun	13	13
	Pendidikan		
	SMP	15	15
	SMA	58	58
3	Perguruan Tinggi	27	27
	Pekerjaan:		
	PNS	24	24
	Tani	10	10
4	Swasta	41	41
	Lain-lain	25	25
	Peserta BPJS		
	Ya	92	92
5	Tidak	8	8
	Informasi tentang BPJS		
6	Ya	97	97
	Tidak	3	3
7	Mengikuti asuransi lain:		
	Ya	3	3
	Tidak	97	97
	Sumber informasi:		
Media cetak	Pelayanan kesehatan	34	34
	Teman/tetangga	50	50
	Lain-lain	13	13
		3	3

Pengetahuan masyarakat tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan di Kelurahan Sananwetan ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Pengetahuan masyarakat tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan di Kelurahan Sananwetan, bulan Juni 2016 (n=100)

No	Pengetahuan	f	%
1.	Baik	73	73
2.	Cukup	26	26
3.	Kurang	1	1

Pengetahuan masyarakat tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan di Kelurahan Sananwetan berdasarkan parameter ditunjukkan dalam tabel.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan sebesar 73% (73 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan yang baik, dan sebesar 26% (26 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan yang cukup.

Berdasarkan hasil penelitian pada parameter prinsip-prinsip BPJS Kesehatan didapatkan bahwa 96% (96 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan baik tentang aspek prinsip-prinsip BPJS Kesehatan yang meliputi, prinsip kegotongroyongan, prinsip nirlaba, prinsip keterbukaan, prinsip kehati-hatian, prinsip akuntabilitas, prinsip portabilitas, prinsip kepesertaan wajib, prinsip dana amanat, dan prinsip pengelolaan dana. Menurut (Muninjaya, 2012) asuransi kesehatan sosial memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah sebuah pelayanan sosial. Pelayanan kesehatan tidak boleh semata-mata diberikan berdasarkan status sosial masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Menurut (Jaminan Kesehatan Nasional) Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Menurut peneliti, Kepala Keluarga mengerti bahwa menjadi peserta adalah bersifat wajib dan semua lapisan masyarakat berhak mendapat jaminan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. Pengetahuan masyarakat tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan di Kelurahan Sananwetan berdasarkan parameter, bulan Juni 2016 (n=100)

No	Parameter	Pengetahuan					
		Baik		Cukup		Kurang	
		f	%	f	%	f	%
1.	Prinsip-prinsip BPJS kesehatan	96	96	4	4	0	0
2.	Penyelenggaraan BPJS kesehatan	44	44	49	49	7	7

Berdasarkan parameter penyelenggaraan BPJS Kesehatan, sebanyak 49% (49 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan cukup dan 44% (44 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan baik. Jaminan sosial penting bagi masyarakat karena setiap individu memiliki resiko mengalami kerentanan sosial. Resiko sosial misalnya sakit, kecelakaan, kematian, pemutusan hubungan kerja, dan lainnyadapat dialami oleh semua masyarakat baik kaya maupun miskin, dengan demikian adanya jaminan sosial merupakan harapan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jaminan sosial tidak hanya memiliki batasan bidang yang dijamin, tetapi juga memiliki program, jenis, metode, pembiayaan, jangka waktu, kepesertaan yang berbeda beda sehingga membutuhkan keterpaduan (Shihab, 2012). Menurut peneliti semua masyarakat memiliki resiko sakit dan adanya BPJS Kesehatan merupakan jaminan sosial untuk masyarakat mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sehingga diperlukan pemahaman yang sama dari masyarakat agar penyelenggaraan BPJS Kesehatan dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur.

Sebanyak 57% (57 Kepala Keluarga) belum mengetahui tentang pelayanan kesehatan yang dijamin. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2013) manfaat adalah faedah jaminan yang menjadi hak peserta dan anggota keluarganya. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Menurut peneliti setiap peserta berhak mendapat jaminan kesehatan, namun masih banyak masyarakat belum mengetahui tentang pelayanan kesehatan yang dijamin, seperti tranfusi darah. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis merupakan pelayanan kesehatan yang dijamin. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli karena mereka kurang memahaminya, sehingga ketika sakit dan mendapat perawatan maka tindakan medis dan tindakan keperawatan diterima begitu saja dan dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya perawatan yang akhirnya muncul keluhan

akibat peningkatan biaya perawatan dan mengakibatkan timbul keluhan dan menjadi sumber ketidakpuasan.

Sebanyak 73% (73 Kepala Keluarga) belum mengetahui tentang penghentian pelayanan kesehatan. Dilakukan penghentian pelayanan kesehatan menurut (Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan): bagi pekerja penerima upah, jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 3 (tiga) bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara. Dan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 6 (enam) bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara. Menurut peneliti, di masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang penghentian pelayanan kesehatan. Dimungkinkan masyarakat belum mengetahui karena Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu maka iuran dibayar oleh pemerintah.

Hal yang memengaruhi pengetahuan Kepala Keluarga tentang BPJS Kesehatan adalah keterpaparan informasi. Menurut Mubarak, dkk. (2007) salah satu faktor yang memengaruhi pengetahuan adalah informasi. Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Sebanyak 97% (97 Kepala Keluarga) pernah mendapat informasi tentang BPJS Kesehatan, terdiri dari 73% (73 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan baik, dan 24% (24 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan cukup. Menurut peneliti, informasi merupakan hasil tahu yang didapat seseorang yang terjadi melalui penginderaan dan seseorang yang memperoleh informasi memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada seseorang yang tidak memperoleh informasi, sehingga seseorang yang pernah mendapat informasi tentang BPJS Kesehatan lebih mengerti daripada seseorang yang tidak pernah mendapat informasi tentang BPJS Kesehatan.

Faktor lain yang memengaruhi pengetahuan Kepala Keluarga tentang BPJS Kesehatan adalah sumber informasi. Menurut Notoatmodjo (2003), informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan

seseorang. Sebanyak 50% (50 Kepala Keluarga) mendapatkan sumber informasi dari pelayanan kesehatan, Menurut peneliti, seseorang yang lebih sering mendapat informasi dari berbagai media cetak/elektronik, dan pelayanan kesehatan maka hal itu dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Apabila seseorang lebih banyak mendapat informasi maka semakin banyak pula pengetahuannya yang dimiliki dibandingkan seseorang yang tidak mendapat informasi. Sehingga seseorang yang mendapat informasi BPJS Kesehatan dari berbagai sumber informasi misalnya pelayanan kesehatan lebih memahami tentang program BPJS Kesehatan.

Pekerjaan yang dimiliki Kepala Keluarga dapat memengaruhi pengetahuan tentang BPJS Kesehatan. Pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan, lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Mubarak, dkk., 2007). Sebanyak 24% (24 Kepala Keluarga) memiliki pekerjaan sebagai PNS, terdiri dari 22% (22 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan baik, dan 2% (2 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan cukup. Menurut peneliti, lingkungan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang karena di dalam lingkungan pekerjaan akan mendapat pengalaman, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah di cover oleh BPJS Kesehatan. PNS merupakan bukan Penerima Bantuan Iuran yang termasuk dalam pekerja penerima upah.

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari kepesertaan. Menjadi peserta BPJS Kesehatan merupakan kepesertaan wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi (Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional). Sebanyak 92% (92 Kepala Keluarga) menjadi peserta BPJS Kesehatan, terdiri dari 72% (72 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan baik, dan 20% (20 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan cukup. Kepala Keluarga yang tidak menjadi peserta sebanyak 8% (8 Kepala Keluarga) yang terdiri dari 1% Kepala Keluarga memiliki pengetahuan baik, dan 7% Kepala Keluarga memiliki pengetahuan cukup. Menurut peneliti, menjadi peserta adalah kewajiban agar seluruh rakyat dapat terjamin kesehatannya dan seseorang yang menjadi peserta BPJS Kesehatan memiliki pengetahuan yang lebih baik karena sudah mendapat pengalaman dan tahu tentang program BPJS Kesehatan yang

dapat diakses dengan mudah, sehingga seseorang yang menjadi peserta BPJS Kesehatan memiliki pengetahuan yang baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Blitar adalah sebanyak 73% (73 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan baik, dan 27% (27 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan cukup.

Sebanyak 96% (96 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan baik tentang prinsip-prinsip BPJS Kesehatan dan sebanyak 4% (4 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan cukup. Sebanyak 44% (44 Kepala Keluarga) memiliki pengetahuan baik tentang penyelenggaraan BPJS Kesehatan, dan 49% memiliki pengetahuan cukup.

Saran

Saran bagi (1) pemegang program BPJS Kesehatan diharapkan terus berupaya melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan haknya dan mengikuti prosedur yang berlaku. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk terus menjaga kesehatan. (2) peneliti selanjutnya hasil penelitian ini hanya mengetahui pengetahuan tentang BPJS Kesehatan, dan dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan penelitian lanjutan dengan variable lain yang belum diteliti. Diantaranya yaitu Tingkat Kepuasan Pasien BPJS Kesehatan Dalam Menerima Pelayanan Kesehatan. (3) bagi institusi pendidikan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar dan tambahan informasi tentang Jaminan Sosial. Penelitian ini dapat memberikan wacana pembelajaran serta pendidikan bagi mahasiswa tentang Jaminan Sosial Khususnya BPJS Kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan*. (http://www.sdm.depkeu.go.id/doc/Buku_Panduan_Layanan_bagi_Peserta_BPJS_Kesehatan.pdf). Diakses tanggal 2 Oktober 2015)

- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2012*. (http://www.depkes.go.id/resource/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2012/15_Profil_Kes.Prov.JawaTimur_2012.pdf). Diakses tanggal 1 Oktober 2015.
- Hidayat, Aziz Alimul. 2008. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Medika.
- Jaminan Kesehatan Nasional. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. (<http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf>). Diakses tanggal 2 Oktober 2015.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Buku Saku FAQ (frequently Asked Question) BPJS Kesehatan*. (<http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-saku-faq.pdf>). Diakses 2 Oktober 2015.
- Mubarak, Wahit Iqbal, Chayatin, Nurul, Rozikin, khoirul, & Supardi. 2007. *Promosi Kesehatan: Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muninjaya, Gde. 2013. *Manajemen Kesehatan Edisi 3*. Jakarta: EGC.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, Ahmad Nizar. 2012. *Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. (http://ditjenpp.kemenumham.go.id/files/doc/2289_jli.pdf). Diakses tanggal 2 Oktober 2015.
- Sutomo, Adi, Heru, Machfoedz, Ircham, Nurlina, Wiwin Erni, & Yunus, Rachmah. 2011. *Teknik Menyusun KTI-Skripsi-Tesis-Tulisan Ilmia dalam Jurnal Bidang Kebidanan, Keperawatan dan Kesehatan*. Yogyakarta: Firmaya.
- Syafrudin, & Mariam. 2010. *Sosial Budaya Dasar untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media.